KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kapasitas gedung DPR sudah tidak memadai
Tanggal : Senin, 25 September 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 6

Kapasitas Gedung DPR sudah tidak Memadai

DIBANGUN pada 1997, Gedung Nusantara I DPR RI yang menjadi kantor para anggota dewan sejatinya diperuntukkan kapasitas 800 orang saja. Namun, dewasa ini, jumlah penggunanya telah mencapai lebih dari 5.000 orang. Hal itu yang melandasi pemikiran bahwa gedung tersebut sudah tidak lagi memadai.

"Seiring dengan perkembangannya, kini Gedung Nusantara I ditempati 560 anggota ditambah 7 staf, terdiri 5 tenaga ahli dan 2 staf administrasi sehingga kini ditempati lebih dari 5.000 orang," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Achmad Juned dalam seminar nasional tentang rencana pembangunan alun-alun demokrasi dan Gedung DPR RI, di Ruang Abdul Muis (Ops Room), Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Djuned, luas ruangan anggota yang hanya berkisar 28 m2 sampai 36 m2 kini menampung seorang anggota dewan dan 7 staf, ditambah dokumen yang terus bertambah. Alhasil, kapasitas ruangan tidak lagi mencukupi.

"Karena itu, pada 2014 dibahas kembali dan Ketua DPR pada 10 Februari 2015 berkirim surat kepada Presiden mohon izin untuk melanjutkan pembangunan perpustakaan dan museum. Pada bulan yang sama disetujui melalui surat Mensesneg untuk melanjutkan pembangunan gedung," ujarnya.

Djuned mengatakan pihaknya juga telah berkirim surat kepada Sekretaris Menteri Negara dan yang terakhir mendapat balasan dari Mensesneg dengan Nomor B 264/Mensesneg/D3/HL 0001/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang ditujukan kepada sekjen mengenai penataan kawasan MPR/DPR dan DPD RI.



DOK DPR

Sekjen DPR Achmad DJuned menjadi pembicara dalam seminar nasional tentang rencana pembangunan alunalun demokrasi dan Gedung DPR RI, di Ruang Abdul Muis (Ops Room).

PERPUSTAKAAN DPR-RI

"Pada prinsipnya Presiden telah menyetujui rencana pembangunan gedung dalam rangka penataan kawasan MPR/DPR dan DPD dalam satu kesatuan," kata dia.

Dalam forum itu, Djuned juga menjelaskan, pascagempa 2009, pihaknya sudah berkirim surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengenai kondisi gedung. "Alhamdulillah, dari hasil audit tidak ada kemiringan arah vertikal. Kalau kemarin ada isu soal kemiringan, kami sudah dapat audit tidak ada soal kemiringan."

Meski demikian, tambahnya, ada keretakan dari lantai 6 sampai 23. Pihak Kementerian PU-Pera merekomendasikan injeksi dan hal itu sudah dilakukan. Pihak kementerian juga menyarankan ada pembatasan pembebanan agar setiap meter persegi Gedung Nusantara I tidak lebih dari 200 kg.

Atas dasar itu, jelasnya, Setjen DPR RI akan melakukan pembangunan gedung, yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut dia, sesuai dengan perpres untuk pejabat negara/eselon I, luasan ruangan adalah 117 m2 dan hasil studi banding ke Gedung MA dan MK juga menunjukkan spesifikasi luas ruangan tersebut, bukan seperti yang sekarang ada di Gedung Nusantara I, hanya 28 m2 hingga 36 m2.

Diakui Djuned, rencana pembangunan gedung masih terkendala, yakni soal analisis biaya dan penahapan. Selain itu, terkait dengan jangka pembangunan yang diharapkan dilaksanakan tahun jamak tetapi diputuskan setelah ada analisis biaya.

"Mudah-mudahan pada 2018 kita bisa memulai lagi apa yang menjadi cita-cita dan angan DPR, memiliki gedung baru. Karena ini merupakan kewajiban pemerintah, kalau Presiden menunjuk yang membangun Kementerian PU-Pera, kami pun tak masalah," kata dia.

Dia menambahkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Setjen DPR RI memiliki tugas mendukung kegiatan dewan dari sisi administratif dan keahlian. Dukungan administrasi tersebut termasuk menyiapkan sarana dan prasarana, yaitu pembangunan gedung. "Sekjen punya kewajiban menyiapkan sarana termasuk Gedung DPR. Ini kewajiban pemerintah dan yang mewakili pemerintah di DPR adalah sekjen," tandasnya. (RO/S2-25)